

Pinjaman Pemda Landak Rp60 M Sudah Lunas

Borneo Tribune, Ngabang
Bupati Landak, Dr. Adrianus mengatakan, pinjaman Pemerintah Landak kepada Bank Kalbar Cabang Ngabang sebesar Rp 60 M sudah lunas.

Hal itu disampaikan saat menyampaikan tanggapan atau jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Landak, Senin lalu.

Fraksi Partai Golkar sebelumnya mohon penjelasan tentang Silpa sebesar Rp.18.10 miliar dan di sisi lain Pemda Kabupaten Landak pada tahun anggaran 2010 melakukan pinjaman pada pihak ke tiga (BANK Kalbar Cabang Ngabang) sebesar Rp.60 Milyar untuk keperluan menutupi defisit pada tahun anggaran berkenaan.

"Silpa sebesar Rp. 18.10



Bupati Landak Drs.Adrianus AS, M.Si menyerahkan dokumen jawaban/penjelasan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Landak kepada Ketua DPRD Heri Saman,SH ,MH, didampingi Wakil Ketua Klemen Apui dan Markus Amid, di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Landak Senin (15/8) kemarin. Foto Amat Dasa /Borneo Tribune

milyar adalah merupakan prediksi atau perkiraan silpa tahun anggaran 2009. Sedangkan silpa rill untuk tahun anggaran 2009 telah dilakukan perhitungan dan diaudit oleh tim dari BPK-RI perwakilan Propinsi Kalimantan Barat adalah sebesar Rp.4,41 milyar, silpa dimaksud merupakan jumlah dana yang dapat dianggarkan untuk keperluan belanja atau untuk menutupi devisit pada tahun anggaran berikutnya: Hutang Pemda yang 60 M tersebut telah lunas dibayar pada bulan April 2011 al lebih cepat 2 bulan sebelum jatuh tempo yang dijanjikan bulan Juni 2011," jelas Adrianus.

Selanjutnya tentang ketegasan kapan Pemda Kabupaten Landak akan menyampaikan RAPBD perubahan tahun anggaran 2011 dan KUA, PPAS, RAPBD tahun anggaran 2012, dijelaskan Adrianus bahwa saat ini dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2012 sudah selesai disusun dan telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Landak pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 untuk dijadualkan pembahasannya antara eksekutif dan legislatif yang nantinya akan dituangkan dalam nota kesepakatan yang merupakan bahan acuan didalam pembuatan pedoman penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).

Mengomentari Fraksi Rakyat Bersatu dan Fraksi Demokrasi Pembaruan tentang terjadinya keterlambatan penyelesaian laporan keuangan pemerintah ta-

hun anggaran 2010, dijelaskan, sebagaimana yang telah disampaikan pada nota pengantar tentang laporan pertanggungjawaban APBD pada tahun anggaran 2010 pada tanggal 4 Agustus 2011 dan hal ini tentunya akan menjadi perhatian dan catatan.

"Kami akui memang SDM yang berlatar pendidikan S1 dan D3 Akutansi jumlahnya terbatas dan masih dirasakan kurang sehingga belum tersebar pada setiap SKPD lingkup pemerintahan Kabupaten Landak. Kedepan berusaha mengusulkan Kuota Formasi CPNS berlatar belakang S1 dan D3 Akutansi ke BAKN sesuai dengan keperluan," ujarnya.

Dan menanggapi pertanyaan dari Fraksi Anugrah tentang plafon anggaran 2011 yang telah disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Landak dan pihak Pemerintah Kabupaten Landak yaitu jumlah belanja daerah sebesar Rp. 495,65 milyar namun di dalam Peraturan Bupati Landak tentang penjabaran APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2011 jumlah belanja tersebut berubah menjadi sebesar Rp. 637,03 milyar atau terjadi selisih kurang sebesar Rp.132 milyar, belum dapat menjelaskan Adrianus.

Belum dapat dijelaskan karena yang dibahas saat ini adalah laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2010, bukan APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2011 seperti dipertanyakan.

Menyinggung tentang persyaratan dan kriteria yang

dijadikan dasar untuk penyaluran bantuan sosial dapat dijelaskan bahwa dasar untuk bantuan sosial yang dilaksanakan selama ini selalu mengacu kepada Keputusan Bupati Landak, untuk tahun anggaran 2010 telah diterbitkan 2 (dua) kali yaitu: Keputusan Bupati Landak nomor: 400/152/HK-2010 tentang bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Landak tahun anggaran 2010.

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrat tentang mohon penjelasan terkait dengan hasil audit BPK RI perwakilan Propinsi Kalimantan barat terhadap laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2009 dijelaskan temuan atas pemeriksa/audit BPK RI

perwakilan Propinsi Kalimantan Barat sebanyak 22 temuan dan 42 rekomendasi.

Realisasi penyelesaian temuan dan rekomendasi sudah terselesaikan (tuntas) sebanyak 39 rekomendasi dan dalam proses sebanyak 3 rekomendasi.

Mengenai rencana detail tata ruang kota Ngabang (RDTL) sudah dibuat sesuai dengan amanat undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Landak tersebut saat ini sedang dalam proses Revisi, dan sedang dalam tahap penyelesaian di Ditjen Bina Bangda, karena tahun ini Kabupaten Landak mendapat bantuan teknis penyusunan RTRW dari Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. (Amat Dasa/Freelancer) □